



GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

Dalam kaitan itu, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2009-2013, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	2,208,309	5,348,926	41.29
2010	2,711,300	7,041,041	38.51
2011	4,503,239	9,819,129	45.86
2012	5,409,449	11,904,245	45.44
2013	5,886,149	11,632,584	50.60
RATA-RATA	4,143,689.20	11,249,284.12	44.34

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur (diolah)

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi fiskal daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2009-2013 sebesar **44,34** persen yang menunjukkan peran/kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan keuangan daerah dikategorikan “sedang”. Namun demikian, Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. di bawah.

Tabel 3. 2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013(Juta Rupiah)

NOMOR REKENING	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN	5,348,926	7,041,041	9,819,129	11,904,245	11,632,584	22.51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,208,309	2,711,300	4,503,239	5,409,449	5,886,149	29.45
4.1.1	Pajak Daerah	1,539,703	2,023,934	3,679,367	4,486,405	4,929,792	36.26
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5,622	10,787	13,699	22,496	33,677	58.20
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121,104	137,612	215,653	207,794	292,184	26.83
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	541,881	538,966	594,520	692,755	630,497	4.33
4.2	DANA PERIMBANGAN	3,122,061	4,308,464	5,298,979	6,089,861	5,335,759	15.88
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,100,091	4,274,657	5,206,241	5,984,332	5,272,172	15.68
4.2.2	Dana Alokasi Umum	17,867	-	51,447	52,638	55,539	(23.04)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	3,811	33,643	38,188	34,616	8,048	177.55
4.2.4	Dana Penyesuaian	292	165	3,104	-	-	410.71
4.2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	18,275	-	(25.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18,556	21,277	16,910	404,935	410,676	572.54
4.3.1	Pendapatan Hibah	8,056	12,127	16,910	15,292	16,045	21.33
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1,753	927	329	-	-	(52.92)
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	15,696	2,401	2,627	(18.82)
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	6,303	11,200	886	12,891	13,418	336.25
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	389,643	394,631	0.32
4.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	10,500	9,150	-	-	-	(28.21)

Sumber: Data Diolah

Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,51 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 572.54 persen, kemudian Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,45 persen, dan Dana Perimbangan menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yakni sebesar 15,88 persen.
2. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,45 persen. Semua unsur PAD menunjukkan *trend* meningkat (pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Kenaikan yang cukup besar dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah yang merupakan unsur dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pendapatan dunia usaha di daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2009 hingga 2013 berada pada kisaran 41,28 hingga 50,60 persen yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tingkat sedang.
3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,88 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak serta DAK yang juga cenderung meningkat. Sedangkan unsur lainnya yaitu DAU terjadi penurunan rata-rata sebesar 23,04 persen. Kenaikan dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan meningkatnya pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagikan kepada daerah. Disisi lain, menurunnya DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat sehingga Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan DAU yang semakin kecil karena secara umum Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kapasitas fiskal cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya. Artinya, Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan cukup dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) sehingga DAU semakin kecil diberikan.
4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 572,54 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari 0,35 persen pada tahun 2009 menjadi 3,53 persen pada tahun 2013. Namun secara spesifik, unsur hibah dari Pemerintah dan unsur hibah dari kelompok masyarakat cenderung menurun.

Perkembangan kontribusi sumber pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 - 2013 dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

NOMOR URUT	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.29	38.51	45.86	45.44	50.60
4.1.1	Pajak Daerah	69.72	74.65	81.70	82.94	83.75
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0.25	0.40	0.30	0.42	0.57
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.48	5.08	4.79	3.84	4.96
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.54	19.88	13.20	12.81	10.71
4.2	DANA PERIMBANGAN	58.37	61.19	53.97	51.16	45.87
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	99.30	99.22	98.25	98.27	98.81
4.2.2	Dana Alokasi Umum	0.57	-	0.97	0.86	1.04
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.12	0.78	0.72	0.57	0.15
4.2.4	Dana Penyesuaian	0.01	0.00	0.06	-	-
4.2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	0.30	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.35	0.30	0.17	3.40	3.53
4.3.1	Pendapatan Hibah	43.41	57.00	100.00	3.78	3.91
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	21.76	7.64	1.94	-	-
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	92.82	15.70	16.38
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	78.24	92.36	5.24	84.30	83.62
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	96.22	96.09
4.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	56.59	43.00	-	-	-

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,568,627	3,157,121	4,679,992	6,126,151	7,103,435	20.89
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	601,474	625,651	697,747	765,958	779,583	6.77
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	410,143	356,170	683,778	856,807	1,567,764	46.78
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	189,787	103,863	130,813	7,074	3,940	(39.55)
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	716,581	901,355	1,863,897	2,132,835	2,692,808	43.31
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	1,650,627	1,170,082	1,303,593	2,354,897	2,059,339	12.60
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	14	-	165	8,581	-	1,228.98
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	2,740,632	2,761,447	3,462,844	5,213,614	6,676,732	26.20
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171,642	252,541	279,926	493,003	568,036	37.33
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	705,568	854,936	1,406,715	2,221,478	2,457,615	38.56
2 . 2 . 3	Belanja Modal	1,863,422	1,653,970	1,776,203	2,499,133	3,651,082	20.74
		6,309,259	5,918,568	8,142,835	11,339,765	13,780,167	23.04

Sumber: Data Diolah

*Data tahun 2013 belum data realisasi

Sedangkan analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2009-2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase realisasi belanja tidak langsung cenderung menurun pada periode 2009-2010 yang disebabkan karena menurunnya unsur belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Namun pada tahun-tahun berikutnya realisasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2013 yang besarnya hampir mencapai 7,10 triliun rupiah.
- 2) Realisasi belanja langsung meningkat karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal, meskipun belanja modal sempat mengalami penurunan pada tahun 2010.
- 3) Terjadinya kenaikan porsi realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2009-2013 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan aset tetap Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebesar 14,13 persen atau secara nominal rata-rata penambahan aset tetap kurang lebih 18,26 triliun rupiah. Pertumbuhan jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana sama-sama mengalami pertumbuhan sebesar 34,15 persen. Aset yang memiliki pertumbuhan rata-rata tertinggi yakni aset tetap sebesar 44,62 persen sedangkan pertumbuhan rata-rata terendah yakni aset lancar sebesar 19,32 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	2,574,032	3,056,753	3,936,790	4,571,861	21.23
1.1.1	Kas	803,529	1,652,456	2,839,332	3,200,549	63.40
1.1.1	Piutang	1,755,023	1,336,446	684,488	324,020	(41.77)
1.1.3	Persediaan	15,480	62,092	409,958	975,830	333.13
	Belanja dibayar dimuka	-	5,759	3,012	71,463	741.65
	INVESTASI JANGKA PANJANG	1,147,051	1,534,257	2,161,020	2,404,564	28.63
	Investasi Jangka Panjang	1,147,051	1,534,257	2,161,020	2,404,564	28.63
1.2	ASET TETAP	12,288,534	13,889,730	15,622,005	18,258,419	14.13
1.2.1	Tanah	2,367,246	2,422,730	2,493,086	2,504,598	1.90
1.2.2	Peralatan dan Mesin	937,179	1,153,840	1,263,524	1,430,437	15.28
1.2.3	Gedung dan Bangunan	4,069,828	4,544,584	5,018,494	5,381,582	9.78
1.2.4	jaln, irigasi dan jaringan	4,433,338	4,756,736	4,968,576	5,559,028	7.88
1.2.5	Aset tetap lainnya	49,531	57,816	419,217	451,384	216.50
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	431,412	954,024	1,459,108	2,931,391	91.66
1.3	ASET LAINNYA	346,067	52,381	179,192	103,519	38.33
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	4,450	5,603	5,888	4,157	0.53
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	162	135	41	40	(29.05)
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	10,970	10,970	10,970	10,970	-
1.3.4	Aset tak berwujud	-	492	18,569	38,860	1,261.51
1.3.5	Aset lain-lain	330,486	35,181	143,724	49,493	51.20
	JUMLAH ASET	16,355,685	18,533,121	21,899,007	25,338,363	34.15
2	KEWAJIBAN					-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	191,479	269,133	296,763	570,419	47.68
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-	581	315	518	6.23
2.1.4	Utang jangka pendek lainnya	191,479	268,552	296,448	569,902	47.63
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Jangka Panjang					-
III-8	JUMLAH KEWAJIBAN	191,479	269,133	296,763	570,419	47.68
3	EKUITAS DANA					-
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	2,382,554	2,787,621	3,640,027	4,020,982	19.35
3.1.1	SILPA	803,529	1,652,438	2,837,724	3,198,904	63.37
3.1.2	Cadangan Piutang	1,755,023	1,342,205	687,500	395,483	(38.26)
3.1.3	Cadangan Persediaan	15,480	62,092	409,958	975,830	333.13
3.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	-	19	1,608	60	2,782.57
3.1.5	Dana yang disediakan untuk hutang jangka pendek	(191,479)	(269,133)	(296,763)	(549,294)	45.31
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	13,781,652	15,476,368	17,962,217	20,746,962	14.62
3.1.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	12,288,534	13,889,730	15,622,005	18,258,419	14.13
3.1.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	346,067	52,381	179,192	83,979	34.70
3.1.3	Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang	1,147,051	1,534,257	2,161,020	2,404,564	28.63
	JUMLAH EKUITAS DANA	16,164,206	18,263,988	21,602,244	24,767,944	15.31
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16,355,685	18,533,121	21,899,007	25,338,363	15.73

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Untuk menganalisis neraca Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2010-2012 akan digunakan analisis rasio sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 - 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	11,3578	13,2658	8,0149
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	11,1271	11,8843	6,3042
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0145	0,0136	0,0225
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0147	0,0137	0,0230
5	Rata-Rata umur piutang	80,1292	37,5614	15,4611
6	Rata-Rata umur persediaan	30,4167	30,4167	30,4167
7	Perputaran total aktiva (<i>total assets turn over</i>)	0,1952	0,2883	0,2963

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perputaran total aktiva (*total assets turn over*) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 0,20 persen di tahun 2010 menjadi 0,30 persen di tahun 2012.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

a. Rasio Lancar

Tabel 3.7
Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aktiva lancar	3.056.753	3.936.790	4.571.861
2	Kewajiban Jangka Pendek	269.133	296.763	570.419
3	Rasio lancar (Aktiva lancar: Kewajiban jangka pendek)	11.3578	13.2658	8.0149

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Secara umum, keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat likuid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi. Namun jika dicermati, terlihat aktiva lancar selama tiga tahun berturut-turut naik sedangkan rasio lancar menunjukkan tren sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu utang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Quick Ratio

Tabel 3.8
Quick Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1	Aktiva lancar	3.056.753	3.936.790	4.571.861
2	Persediaan	62.092	409.958	975.830
3	Kewajiban Jangka Pendek	269.133	296.763	570.419
4	Quick Ratio ((Aktiva lancar - persediaan) : kewajiban jangka pendek)	11,13	11,88	6,30

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Quick ratio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat persediaan dari *current asset*-nya dimana pada tahun 2012 rasio ini tampak menurun meskipun masih tergolong “sangat sehat”.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang yang menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam *Ratio Leverage* adalah:

a. Rasio total hutang terhadap total aset

Tabel 3.9
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 - 2010 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Total Hutang	269.133	296.763	570.419
2	Total Aset	18.533.121	21.899.007	25.338.363
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (Total Hutang : Total Aset)	0,0145	0,0136	0,0225

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Rasio ini pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Rasio total hutang di tahun 2012 naik menjadi 2,25 persen dari tahun sebelumnya 1,36 persen. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih cukup jauh di bawah nilai total aset.

b. Rasio hutang terhadap modal

Tabel 3.10
Rasio Total Hutang Terhadap Modal Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 - 2012 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Total Hutang	269.133	296.763	570.419
2	Ekuitas Dana Lancar	2.787.621	3.640.027	4.020.982
3	Ekuitas Dana Investasi	15.476.368	17.962.217	20.746.962
4	Total Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar + Ekuitas Dana Investasi)	18.263.988	21.602.244	24.767.944
5	Rasio Total Hutang Terhadap Modal (Total Hutang : Total Ekuitas)	0,0147	0,0137	0,0230

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Rasio total hutang terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nilai total ekuitas yang merupakan nilai ekuitas dana lancar ditambah dengan nilai ekuitas dana investasi ternyata jauh lebih besar dari total hutang.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan antara lain:

- Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Terlihat dari hasil perhitungan pada tahun 2012 bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang adalah 15,46 hari dimana angka ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut perhitungan lengkapnya:

Tabel 3.11
Rata-Rata Umur Piutang
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo Awal Piutang	1.755.023	1.336.446	684.488
2	Saldo Akhir Piutang	1.336.446	684.488	324.020
3	Rata-rata piutang pendapatan daerah ((saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2)	1.545.734	1.010.467	504.254
4	Pendapatan Daerah	7.041.041	9.819.129	11.904.245
5	Perputaran piutang (pendapatan daerah/rata- rata piutang pendapatan daerah)	4,56	9,72	23,61
6	Rata-rata umur piutang (365 : perputaran piutang)	80,1292	37,5614	15,611

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

Dari Tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata umur piutang Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami penurunan. Rata-rata umur piutang pada tahun 2010 sebesar 80,13 kemudian di tahun 2011 menurun menjadi 37,56 dan terakhir pada tahun 2012 menjadi hanya 15,61 hari.

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur persediaan tahun 2012 sebesar 30 hari dimana angka ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.12
Rata-Rata Umur Persediaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1	Saldo Awal Persediaan	15.480,37	62.091,93	409.958,00
2	Saldo Akhir Persediaan	62.091,93	409.958,00	975.829,90
3	Rata-rata Nilai Persediaan ((saldo awal Persediaan + saldo akhir Persediaan) : 2)	38.786,15	236.024,96	692.893,95
4	Nilai Persediaan yang digunakan dalam satu tahun (Rata-rata nilai persediaan x 12 bulan)	465.433,82	2.832.299,57	8.314.727,38
5	Perputaran persediaan (Nilai Persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan)	12,00	12,00	12,00
6	Rata-rata persediaan (365 : perputaran Persediaan)	30,4167	30,4167	30,4167

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

- c. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*), rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 2010 tetapi stagnan pada tahun 2012 sebesar 0,30. Dari angka yang cenderung kecil menggambarkan bahwa peningkatan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mendorong meningkatnya PAD. Perhitungan lengkap perputaran total aktiva dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perputaran Total Aktiva
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.711.300	4.503.239	5.409.449
2	Aset Tetap	13.889.730	15.622.005	18.258.419
3	Perputaran Total Aktiva (PAD : Aset Tetap)	0,1952	0,2883	0,2963

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan APBD Prov. Kalimantan Timur (diolah)

3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.14

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Kaltim

No	Tahun	Opini
1	2010	Wajar dengan pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar dengan pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar tanpa pengencualian (WTP)

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- (3) Analisis proyeksi belanja daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada tabel berikut:

Tabel 3.15
PROPORSI PENGGUINAAN ANGGARAN TAHUN 2009- 2013

No.	Uraian					
		2009	2010	2011	2012	2013
A.	Belanja Tidak Langsung	601,474,433,840.22	625,651,381,989.00	697,747,236,397.12	765,957,564,746.66	779,583,156,002.58
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	253,664,629,869.00	282,686,825,290.00	321,603,111,260.00	345,849,295,474.00	361,791,571,958.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	260,831,028,929.22	268,717,838,944.00	274,905,684,412.00	290,737,076,009.00	282,645,888,178.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	8,424,784,520.00	9,684,744,000.00	12,369,678,000.00	12,740,000,000.00	13,985,068,000.00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	78,553,990,522.00	64,561,973,755.00	88,868,762,725.12	116,631,193,263.66	121,160,627,866.58
B	Belanja Langsung	582,296,270,230.00	727,215,325,450.30	706,508,895,752.98	886,794,735,893.46	897,689,292,333.40
1	Belanja Honorarium PNS	96,821,882,071.00	204,723,056,986.30	236,130,502,745.98	301,138,430,346.46	204,012,910,660.00
2	Belanja Uang Lembur	420,639,500.00	350,008,799.00	861,310,000.00	159,150,000.00	426,900,000.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	14,030,110,000.00	23,256,500,000.00	26,491,775,000.00	35,817,610,000.00	29,524,256,000.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,555,493,558.00	23,997,826,659.00	29,835,573,432.00	24,023,065,510.00	26,158,716,379.00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1,804,889,501.00	2,072,758,200.00	1,902,196,575.00	1,077,250,000.00	2,522,912,629.00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	66,383,094,160.00	60,543,389,821.00	65,333,457,057.00	85,464,765,073.00	96,286,381,107.00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5,064,072,245.00	5,180,364,455.00	5,462,398,200.00	4,754,774,325.00	4,477,332,850.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,199,296,700.00	6,021,610,275.00	6,891,634,015.00	5,904,153,720.00	9,496,886,700.00
9	Belanja Perjalanan Dinas	221,461,096,267.00	267,691,966,244.00	232,464,274,467.00	308,508,113,319.00	367,812,872,488.40
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	55,813,850.00	-	-	29,908,700.00	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	14,510,000.00	-	12,500,000.00	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	153,499,882,378.00	133,363,334,011.00	101,135,774,261.00	119,905,014,900.00	156,970,123,520.00
	TOTAL	1,183,770,704,070.22	1,352,866,707,439.30	1,404,256,132,150.10	1,652,752,300,640.12	1,677,272,448,335.98

Tabel 3.16
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2009	1,183,771	6,634,259	17.84
2	2010	1,352,867	6,193,324	21.84
3	2011	1,404,256	8,633,842	16.26
4	2012	1,652,752	11,542,565	14.32
5	2013	1,677,272	13,780,167	12.17

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 3.16 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan bahkan mencapai 12,17 persen pada tahun 2013.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

TABEL 3.17
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Tidak Langsung	1,239,502	1,462,444	2,472,775	2,782,162	3,351,231	30.01
Gaji dan Tunjangan	253,665	282,687	321,603	345,849	361,792	9.34
Tambahan Penghasilan PNS	260,831	268,718	274,906	290,737	282,646	2.08
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8,425	9,685	12,370	12,740	13,985	13.86
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	716,581	901,355	1,863,897	2,132,835	2,692,808	43.31
Belanja Langsung	72,184	99,669	125,603	156,033	161,255	22.92
Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	30,710	44,739	59,637	64,969	65,875	22.33
Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	14,030	23,257	26,492	35,818	29,524	24.33
Belanja Jasa Kantor	24,619	30,632	35,623	46,945	48,832	19.13
- Belanja Air	3,060	4,033	3,540	4,445	3,657	6.85
- Belanja Listrik	13,836	18,976	21,927	26,950	25,917	17.94
- Belanja Surat Kabar/Majalah	1,554	1,491	2,591	3,145	3,207	23.27
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet	331	569	798	2,059	4,440	96.40
- Belanja Sewa Gedung	5,838	5,562	6,767	10,346	11,611	20.52
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,825	1,042	3,851	8,302	17,024	106.81
Pembiayaan Pengeluaran	-	20,156	78,857	-	-	47.81
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	20,156	78,857	-	-	47.81
Total	1,311,686	1,582,270	2,677,235	2,938,195	3,512,485	29.78

Sumber: Data Diolah, *Tahun 2013 data target belanja

Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2009-2013 dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2009-2013 adalah sebesar 29,78 persen. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- 2) Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 30,01 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja tidak langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja bagi hasil yang mencapai 43,31 persen dan memiliki nominal terbesar diantara semua unsur belanja tidak langsung.
- 3) Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 22,92 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja jasa kantor sebesar 106,81 persen diantara unsur-unsur yang lain. Selain itu belanja beasiswa tugas belajar bagi PNS rata-rata pertumbuhannya sebesar 24,33 persen. Hal ini mengindikasikan *concern*-nya pemerintah terhadap peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	5,749,291.27	6,303,237.13	8,347,562.45	10,502,616.10	11,940,096.02
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	7,455,431.65	6,717,224.27	9,452,216.38	13,137,540.00	15,139,000.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	343,216.26	284,459.29	547,783.62	202,800	-
	DEFISIT RIIL	(2,049,356.63)	(721,876.15)	(1,652,437.55)	(2,837,723.90)	(3,198,903.98)

Adapun penutup defisit riil anggaran Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	2,049,356.63	721,876.15	1,652,438	2,837,224	3,198,904
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Biro Keuangan

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,70 persen.

Tabel 3. 20
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,049,356.63	721,876.15	1,652,438	2,837,224	3,198,904
	a. Pelampauan Penerimaan PAD	336,880	213,550	430,941	519,187	718,969
	b. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	845,502	(625,970)	292,986	946,668	693,691
	c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	824	12,056	13,877	5,711	(11,031)
	d. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	866,150.63	1,111,024.15	914,634	1,365,658	1,797,275
	e. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		11,216			-
	f. Kegiatan Lanjutan					-

Sumber: Data Diolah

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan

bahwa terjadi penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 11 persen yang berarti telah terjadi peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, pelampauan penerimaan PAD cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi PAD.

Pelampauan penerimaan dana perimbangan cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 41 persen yang mengindikasikan adanya penurunan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya DAU. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 310 persen yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Namun pada tahun 2012 dan tahun 2013 SILPA kembali meningkat yang diakibatkan karena banyaknya kegiatan tidak terselesaikan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terutama kegiatan-kegiatan *Multi Years Contract* yang terkendala dalam hal *land acquisition*.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur. Penentuan proyeksi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel 3.21 :

Tabel 3.21
Proyeksi Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

URAIAN	TARGET				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN	10.330.833	8.527.563	8.869.967	8.885.343	8.956.664
A PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.519.834	5.545.995	5.334.224	5.523.126	5.719.045
1 Pajak Daerah	4.650.182	4.669.869	4.478.780	4.626.517	4.779.395
a. Pajak Kendaraan Bermotor	655.000	745.730	735.000	771.750	810.338
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.220.000	1.078.060	1.030.000	1.060.900	1.092.727
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.640.000	2.690.000	2.575.000	2.652.250	2.731.818
d. Pajak Air Permukaan	5.182	6.579	6.180	6.365	6.556
e. Pajak Rokok	130.000	149.500	132.600	135.252	137.957
2 Retribusi Daerah	11.846	12.205	12.096	12.339	12.586
a. Retribusi Jasa Umum	5.649	5.798	5.878	5.995	6.115
b. Retribusi Jasa Usaha	6.015	6.221	6.049	6.170	6.294
c. Retribusi Perizinan Tertentu	182	186	169	173	177
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	273.175	281.185	289.812	298.506	307.461
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	584.631	582.736	553.536	585.763	619.603
B DANA PERIMBANGAN	4.443.872	2.615.366	3.168.542	2.994.516	2.869.417
1 Bagi Hasil Pajak	820.000	668.000	673.000	678.000	683.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	470.000	290.000	295.000	300.000	305.000
b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29	350.000	378.000	378.000	378.000	378.000
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	3.715.890	1.888.670	2.436.846	2.257.820	2.127.721
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24.825	14.481	13.615	13.535	12.981
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH)	850	1.500	1.500	1.500	1,500
c. Landrent	8.809	8.000	8.102	8.102	8,102
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti)	1.013.663	554.400	691.200	615.600	583,200
e. Minyak Bumi	547.204	410.370	514.646	483.767	454,741
f. Gas Bumi	1.264.357	899.919	1.207.783	1.135.316	1,067,197
g. Asumsi CAD	750.000				
h. Kurang Salur	106.182				
3 Dana Perimbangan Lainnya	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696
a. Dana Alokasi Umum	57.313	57.313	57.313	57.313	57,313
b. Dana Alokasi Khusus	1.384	1.384	1.384	1.384	1,384
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	367,126	366,201	367,201	367.701	368.201
1 Pendapatan Hibah	15,495	14.570	15.570	16.070	16.570
2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	351,631	351.631	351.631	351.631	351.631

Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah tidak lepas dari pemahaman realisasi pendapatan daerah pada periode sebelumnya dan juga harus diselaraskan dengan isu strategis terkait pada periode lima tahun ke depan.

Proyeksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan cukup berhati-hati dan jauh dari kesan “muluk-muluk”; mengingat pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur cukup signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Secara umum, kekhawatiran tersebut ditujukan pada pendapatan dari dana perimbangan terutama terkait dengan bagi hasil bukan pajak pada sektor migas dan batubara, sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai pajak daerah selalu meningkat dan terlihat cukup signifikan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun yaitu sebesar 28,73 persen. Selain itu, pajak daerah merupakan kontributor tertinggi dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2013 pajak daerah menyumbang sekitar 83,75 persen terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus menata pengelolaan pajak daerah sehingga dapat menjadi salah satu sumber utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Proyeksi pajak daerah dalam lima tahun ke depan tidak menunjukkan perubahan yang berarti meskipun mengalami penurunan (tapi tidak signifikan) pada periode 2013-2014. Hal ini dikarenakan terjadinya *cancel out* pajak daerah dari hasil kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan faktor pendorong dan penarik proyeksi pajak daerah.

Faktor pendorong (penambah) proyeksi pajak daerah:

- a. Adanya kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berefek pada kenaikan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan secara tidak langsung kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- b. Melakukan penertiban dan penataan pungutan terhadap wajib pajak seperti menggunakan sistem “jemput bola” (penempatan mobil Samsat di kampus, penyediaan speed boat untuk wajib pajak daerah terpencil, hingga sarasa Samsat Jelajah);
- c. Secara periodik melakukan sosialisasi, razia lapangan, penagihan, pendataan, hingga rekonsiliasi terhadap seluruh wajib pajak terkait berbagai hak dan kewajibannya; dan
- d. Mulai tahun 2014, pajak rokok akan menjadi sumber pendapatan daerah

Faktor penarik (pengurang) proyeksi pajak daerah:

- a. Berkurangnya potensi pajak daerah yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administrasi dan pokok bea balik nama kendaraan kedua dan seterusnya (Pergub no. 5 tahun 2013);

2. Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proyeksi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengalami penurunan signifikan pada periode 2013-2014 yang dipengaruhi oleh adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara sehingga potensi retribusi daerah berkurang namun proyeksi pada 2014-2018 mengalami kenaikan secara konsisten yang disebabkan oleh:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya sarana-prasarana yang dimiliki instansi terkait kesehatan,
- b. Penerapan retribusi penggantian biaya cetak peta oleh Distamben Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun 2014,
- c. Peningkatan sarana tersier kebutuhan masyarakat seperti tempat rekreasi, olahraga, maupun penginapan/hotel,
- d. Peningkatan kuantitas produksi usaha daerah dari berbagai sektor,
- e. Peningkatan pengguna kendaraan bermotor yang akan mendorong retribusi parkir,
- f. Peningkatan hasil penyertaan modal pada perusahaan daerah dan pihak ketiga,
- g. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah, dan
- h. Peningkatan sumbangan pihak ketiga.

3. Urgensi Sektor Migas dan Batubara terhadap Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang merupakan kontributor terbesar pendapatan daerah pada tahun 2012 mengalami penurunan pada tahun 2013 dan berimbas pada proyeksi dana perimbangan periode 2014-2018. Penurunan dana perimbangan proyeksi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 16,72 persen dari dana perimbangan tahun 2013 yang mencapai 5,34 triliun dan proyeksi secara umum terus menurun hingga tahun 2018 dana perimbangan diproyeksikan hanya sebesar 2,87 triliun. Terdapat beberapa indikator pemicu penurunan proyeksi dana perimbangan yakni sebagai berikut.

- a. Pada dana perimbangan dari hasil bagi pajak, pemicu penurunan dana perimbangan diakibatkan pada penurunan penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penurunan bagi hasil PBB terjadi karena penerimaan sektor PBB P2 (pedesaan dan perkotaan) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga penerimaan sektor PBB pemerintah provinsi hanya berasal dari PBB P3 (Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan). Selain itu, dengan diterbitkannya surat edaran Gubernur 180/1375-HK/2013 tertanggal 25 Januari 2013 (terkait moratorium perijinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan) akan menyebabkan PBB P3 mengalami penurunan.
- b. Pada dana perimbangan dari hasil bukan pajak, pemicu terbesar penurunan dana perimbangan berasal dari bagi hasil sektor migas dan batubara. Penurunan bagi hasil pertambangan terjadi karena:
 - Adanya pembatasan jumlah produksi batubara oleh pemerintah pusat
 - Harga batubara dari tahun ke tahun cenderung menurun karena adanya ekonomi global yang dibarengi penurunan permintaan batubara
 - Penurunan produksi batubara karena merupakan sumber daya alam tak terbarukan
 -

Sedangkan penurunan bagi hasil sektor migas terjadi karena:

- Belum diketemukannya cadangan baru untuk eksplorasi migas (wilayah 0-12 mil)
- Terjadinya penurunan produksi migas secara alamiah sekitar 6-10 persen per tahun

3.3.2 Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.22 maka dapat di proyeksikan besaran SILPA tahun 2014-2018 setiap tahunnya selalu mengalami selisih positif. Di tahun 2012, persentase anggaran naik sebesar 4,70 persen sehingga untuk tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2013-2018 anggaran juga dinaikkan sebesar 4,70 persen. Jika dilihat pada tabel di bawah ini maka pada tahun 2012 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SiLPA sebesar 2.837.224 juta rupiah sedangkan pada tahun 2013 mempunyai SiLPA sebesar 3.198.904 juta rupiah.

Tabel 3.22
Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Dasar 2012	Proyeksi					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.837.224	3.198.904	958.425	800.000	750.000	600.000	500.000
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman Daerah	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Piutang Daerah	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pencairan Dana Cadangan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel diatas menunjukkan proyeksi pembiayaan tahun 2013-2018 yang berasal dari SiLPA dengan menggunakan asumsi bahwa SiLPA semakin menurun di tiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dengan syarat bahwa pada tahun 2015 kinerja SKPD terus meningkat terutama dalam mengoptimalkan dan mengefisiensikan anggaran. Oleh karena itu perlu kebijakan untuk menggenjot kinerja SKPD agar proyeksi bisa terwujud sehingga efektifitas anggaran tetap terjaga.

3.3.3 Proyeksi belanja wajib dan mengikat

Pada proyeksi belanja wajib dan mengikat dengan tahun dasar 2013 sampai dengan tahun 2018 menggunakan pendekatan peningkatan belanja sekitar 1,12 persen setiap tahunnya.

Tabel 3.23
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	Tahun Dasar (2013)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Tidak Langsung	3,351,231	3,293,994	3,153,819	3,229,872	3,311,760	3,400,109
	Gaji dan Tunjangan	361,792	406,104	451,316	501,561	557,400	619,455
	Tambahan Penghasilan PNS	282,646	445,300	445,300	445,300	445,300	445,300
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	13,985	13,621	13,749	13,877	14,007	14,138
	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	2,692,808	2,428,968	2,243,454	2,269,133	2,295,053	2,321,215
2	Belanja Langsung	161,255	197,601	222,167	250,698	283,938	322,785
	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	65,874	69,168	72,626	76,257	80,070	84,074
	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	29,524	26,204	28,824	31,707	34,877	38,365
	Belanja Jasa Kantor	48,832	82,784	96,411	112,352	131,014	152,875
	- Belanja Air	3,657	5,899	6,631	7,453	8,377	9,416
	- Belanja Listrik	25,917	35,027	41,527	49,233	58,370	69,202
	- Belanja Surat Kabar/Majalah	3,207	3,303	4,135	5,176	6,480	8,111
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4,440	7,340	8,220	9,207	10,312	11,549
	- Belanja Sewa Gedung	11,611	31,216	35,898	41,283	47,475	54,596
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	17,024	19,445	24,306	30,382	37,978	47,472
3	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	Total	3,512,485	3,491,594	3,375,986	3,480,569	3,595,699	3,722,894

Sumber: Data Diolah

3.3.4 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan untuk prioritas I, II dan III tersaji pada tabel 3.24 :

Tabel 3.24
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	10,330,833	8,527,563	8,869,967	8,885,343	8,956,664
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	958,425	800,000	750,000	600,000	500,000
4	Total Penerimaan	11,289,258	9,327,563	9,619,967	9,485,343	9,456,664
	Dikurangi					
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat	3,491,594	3,375,986	3,480,569	3,595,699	3,722,894
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	7,797,663	5,951,577	6,139,398	5,889,645	5,733,769

Sumber: Data Diolah

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan calon kepala daerah. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

➤ Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) calon kepala daerah sebagaimana dijanjikan pada kampanye pemilukada. Selain itu, alokasi anggaran juga harus disesuaikan dengan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti di bidang pendidikan mendapat alokasi dana 20 persen dari belanja daerah.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, serta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi sehingga memberikan dampak luas pada masyarakat sesuai dengan capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menyederhanakan perhitungan, pendanaan prioritas I akan dihitung sesuai pagu total program pembangunan daerah atau program prioritas untuk mencapai sasaran RPJMD sebagaimana diuraikan di bab VII.

➤ Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis pada tiap bidang urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat. Program/kegiatan unggulan ini harus disesuaikan dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

➤ Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.25
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Proyeksi (juta rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	7,797,663	5,951,577	6,139,398	5,889,645	5,733,769
	Rencana alokasi prioritas I dan II					
II	Belanja Langsung seluruh bidang urusan	6,734,671	5,135,252	5,274,759	5,016,741	4,837,606
II.a	Jumlah prioritas I	3,276,359	3,509,629	3,712,088	3,524,611	3,295,234
II.b	Sisa belanja langsung untuk prioritas II (II-II.a) III-26	3,458,312	1,625,623	1,562,671	1,492,130	1,542,372
III	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	100,000	100,000	100,000	100,000
IV	Jumlah prioritas III (I-II-III)	1,062,992	716,325	764,639	772,904	796,163
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)	0	0	0	0	0

Tabel 3.26
Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jutaan Rupiah				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Total Penerimaan	11,289,258	9,327,563	9,619,967	9,485,343	9,456,664
II	Belanja Langsung (IIa + IIb)	6,932,272	5,357,419	5,525,457	5,300,679	5,160,391
IIa	Belanja langsung seluruh bidang urusan (prioritas I & II)	6,734,671	5,135,252	5,274,759	5,016,741	4,837,606
IIb	Belanja langsung wajib dan mengikat	197,601	222,167	250,698	283,938	322,785
III	Belanja tidak langsung (IIIa + IIIb)	4,356,986	3,870,144	3,994,511	4,084,664	4,196,272
IIIa	Belanja tidak langsung (Prioritas III)	1,062,992	716,325	764,639	772,904	796,163
IIIb	Belanja tidak langsung wajib dan mengikat	3,293,994	3,153,819	3,229,872	3,311,760	3,400,109
IV	Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	100,000	100,000	100,000	100,000
V	Surplus/defisit (I-II-III-IV)	0	0	0	0	0

3.4 KEBUTUHAN INVESTASI DAERAH

Dengan memperhitungkan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang, pendanaan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Perkiraan kebutuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur tahun lima tahun mendatang disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari 4,21 persen pada tahun 2014 menjadi 4,6 persen pada tahun 2016 dan 5,11 persen pada tahun 2018;
- (2) Nilai ICOR (*incremental capital to output ratio* atau rasio penambahan modal terhadap produksi) dari 3,65 persen pada tahun 2014 menjadi 3,5 pada tahun 2016 dan 3,35 pada tahun 2018;
- (3) Tingkat depresiasi diperkirakan 5,00 persen per tahun;
- (4) Tingkat tabungan per tahun merupakan hasil perkalian dari pertumbuhan ekonomi ditambah depresiasi dan nilai ICOR;
- (5) Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 5 persen per tahun;
- (6) Kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dihitung berdasarkan jumlah belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditambah belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan kenaikan belanja modal sebesar 5 persen per tahun;
- (7) Investasi Pemerintah Pusat dihitung dari nilai investasi tahun 2013 dengan memperhitungkan pertumbuhan 5 persen per tahun;

- (8) Perkiraan pertumbuhan nilai investasi swasta (Penanaman Modal Dalam negeri dan Penanaman Modal Asing) sebesar 5 persen per tahun; dan

Dengan memperhitungkan berbagai asumsi tersebut, sampai dengan tahun 2018 diperkirakan akan terjadi kesenjangan investasi. Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Provinsi Kalimantan Timur (lihat Tabel 3.27).

Tabel 3.27
Perkiraan Kebutuhan Investasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,21	4,43	4,66	4,88	5,11	5,2
2	ICOR	3,65	3,65	3,5	3,5	3,35	3,35
3	Tingkat depresiasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	33,62	34,42	33,81	34,58	33,87	34,17
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)	125.122	128.051	133.732	139.963	146.802	154.301
6	Tingkat Inflasi (%)	5,55	5,45	5,35	5,25	5,15	5,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	42.062	44.074	45.215	48.399	49.720	52.725
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	15.644	16.426	17.247	18.110	19.015	19.966
	a. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.809	1.899	1.994	2.094	2.199	2.309
	b. Belanja Modal Pemerintah Kota (Rp. Miliar)	13.835	14.527	15.253	16.016	16.817	17.657
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	26.418	27.648	27.968	30.289	30.705	32.759
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	6.500	6.825	7.508	8.258	9.084	9.992
11	Perkiraan Investasi Swasta (Rp. Miliar)	19.918	20.823	20.460	22.031	21.621	22.766
12	Perkiraan Investasi Swasta PMDN berjalan (Rp. Miliar)	7.709	8.094	8.499	8.924	9.370	9.839
13	Perkiraan Investasi Swasta PMA berjalan (Rp. Miliar)	2.529	2.655	2.788	2.928	3.074	3.228
14	Kebutuhan Investasi Swasta Baru	9.680	10.074	9.173	10.179	9.176	9.700

Sumber: Hasil Analisis 2013